

ABSTRAK

Nama: Alpiyah, NIM: 131200304, Judul Skripsi: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Pekara Nomor: 453/K/TUN/2014 Tentang Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang).

Proses pemilihan Kepala Desa pada tahun 2013 di Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang diwarnai dengan berbagai kecurangan. Terdapat dua calon Kepala Desa yakni Bapak H. Ahmad Nuryadi dan Bapak Alias. Salah satu dari calon Kepala Desa yang tidak terpilih merasa dirugikan karena adanya kecurangan tersebut, kemudian mengajukan permohonan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bapak Alias sebagai Penggugat melawan Bupati Tangerang sebagai Tergugat dan Bapak H. Ahmad Nuryadi sebagai Tergugat II Intervensi. Objek sengketa dalam gugatan ini adalah keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.386-Huk/2013 tentang “Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh Terpilih Sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang” tertanggal 22 juli 2013.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung perkara nomor:453/K/TUN/2014?. 2) Bagaimana akibat hukum dari amar putusan majelis hakim pada perkara putusan nomor: 453/K/TUN/2014?.

Tujuan penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung perkara nomor: 453/K/TUN/2014, 2) Untuk mengetahui akibat hukum dari amar putusan majelis hakim pada perkara putusan nomor: 453/K/TUN/2014.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan melalui pendekatan normatif empiris, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Serta mengumpulkan data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan *Pertama*, Majelis hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan perkara tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung pada perkara nomor: 453/K/TUN/2014 adalah ditolaknya permohonan kasasi tersebut maka pemohon harus mencabut atau membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.386-Huk/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dukuh terpilih sebagai Kepala Desa Dukuh Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Setelah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dicabut maka Pemohon Kasasi I semula Pembanding/Tergugat I harus menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru. Dengan adanya KTUN yang baru itu berarti Bapak H. Ahmad Nuryadi sebagai Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat II Intervensi bukan lagi sebagai Kepala Desa terpilih Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Akan tetapi pada kenyataannya Pemohon Kasasi I semula Pembanding/Tergugat I tidak melaksanakan putusan tersebut.